

DPR Minta Jokowi Segera Kirim Surpres Pengganti Andika Perkasa

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengirimkan surat presiden (surpres) calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Sebab, Komisi I DPR perlu segera menggelar *fit and proper test* sebelum masa reses pada 16 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.

"Artinya apabila Presiden memutuskan untuk dilaksanakan pergantian panglima, maka surpres usulan pergantian panglima harus dikirimkan sesuai aturan yang berlaku, sebelum DPR melaksanakan reses," ujar Hasanuddin ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (15/11).

Sesuai ketentuan, masa jabatan Andika bakal berakhir 31 Desember 2022 dan masa pensiunnya dimulai 1 Januari 2022. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, DPR harus memberikan persetujuan.

Calon Panglima TNI

yang diusulkan presiden paling lambat 20 hari setelah permohonan persetujuan diterima oleh Parlemen. Maka paling lambat, surpres terkait calon Panglima TNI harus diterima 25 November 2022. Dengan begitu, mekanisme *fit and proper test* dan persetujuan DPR bisa disampaikan sebelum memasuki masa reses.

"Tetapi hingga hari ini usulan pergantian atau perpanjangan Panglima TNI belum ada informasi," ujarnya.

"Kami di DPR RI masih menunggu karena waktunya mepet mohon atensi dari Istana," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bakal segera memilih calon pengganti Andika Perkasa. Ia mengungkapkan kandidatnya bakal dipilih dari tiga kepala staf angkatan.

"Sudah semua di kantong, kan memang harus dari kepala staf yang ada, nanti segera dipilih," tutur Jokowi ditemui pasca perayaan HUT Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (7/11)alu. ● han

PDI-P Ngaku Banyak Kadernya Dicurai Partai Lain yang Sedang Verifikasi

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Cornelis menceritakan masih adanya kesalahan-kesalahan dalam administrasi keanggotaan partai politik. Hal ini semestinya penting disoroti penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Cornelis mencontohkan, bagaimana ada sejumlah anggota PDI-P justru masuk dalam keanggotaan partai lain.

"Saya dapat temuan di lapangan, partai politik ini kan sedang lagi dilakukan verifikasi. Di lapangan, masa data data yang diberikan itu *double*? Orang yang PDI Perjuangan, kok masuknya ke partai lain, NIK-nya juga dapat, dari mana itu?" ujar Cornelis dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama penyelenggara Pemilu, Selasa (15/11).

Cornelis berharap ketegasan dari penyelenggara Pemilu untuk tidak meloloskan partai tersebut. Sayangnya Cornelis tidak menyebut

partai mana yang dimaksudkannya.

"Kalau memang partai politik ini seperti ini, sebaiknya jangan diloloskan, repot kita," ujarnya.

Ia bercerita, berdasarkan temuannya, ada pemuka agama yang turut masuk keanggotaan partai politik.

"Jadi tahu, tolong itu, jangan sampai, pastor juga lalu masuk. Kasian kawan-kawan KPU, yang kerja memverifikasi, jauh-jauh masuk ke kampung-kampung sana," kata Cornelis.

Sebab itu, Cornelis menyarankan agar KPU dan Bawaslu memverifikasi partai politik di tingkat pusat.

Menurutnya, jika di tingkat pusat, sebuah partai dinyatakan lolos, langsung dipersilakan mengikuti pemilu.

"Enggak usah verifikasi lagi, udah, ikut aja pemilu. Ada atau tidak, pengurus di sana, masa bodoh. Darpada mencuri orang punya anggota. Jangan anggota PDI Perjuangan banyak dicuri, komplain mereka dengan saya. Bagaimana ini pak, katanya," ujar Cornelis. ● han



SIDANG PERDANA MANTAN PRESIDEN ACT AHYUDIN

Terdakwa mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin (dalam layar) mendengarkan pembacaan dakwaan saat menjalani sidang perdana secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (15/11). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan penggelapan dana bantuan Boeing oleh ACT.

Tiga Nelayan Hilang di Perairan Pulau Pini Masih Dicari Basarnas

NIAS (IM) - Tiga orang nelayan asal Dusun 3, Desa Botolakha, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Pulau Pini, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Tim dari Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) langsung melakukan pencarian.

Humas Basarnas Nias, Asanimu Waruwu mengatakan ketiga nelayan itu berangkat dari Nias Utara dengan menggunakan kapal ikan milik Feberman Zai alias Floris Zai pada Selasa, 8 November 2022 kemarin.

"Mereka seharusnya

sampai di lokasi pada hari Sabtu, 12 November 2022. Namun sampai saat ini mereka hilang kontak," kata Asanimu, Selasa (15/11/2022).

Asanimu menyebutkan, Plt. Kepala Basarnas Nias, Benteng Telaumbanua langsung memberangkatkan satu tim penyelamat begitu mendapatkan laporan atas hilangnya ketiga nelayan tersebut. Tim yang diberangkatkan akan melakukan pencarian di sekitar perairan Pulau Pini.

"Saat ini tim sedang menuju ke lokasi dan seandainya mereka di lokasi akan langsung melakukan pencarian. Kita harap korban hilang segera ditemukan," katanya. ● meci

2 Polhukam

FOTO: IDN/ANTARA



KY Bentuk Satgasus, DPR: Dasar Hukum dan Juntrungannya Tidak Jelas

Ketimbang membentuk satgasus yang tak jelas dasar hukumnya, lebih baik KY bekerja lebih keras untuk mengawasi perilaku para hakim.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i tak sepekat dengan langkah Komisi Yudisial (KY) membentuk satuan tugas khusus (satgasus). Ia menilai, keberadaan satgasus itu tak memiliki dasar hukum jelas.

"Enggak usah ada lagi keinginan untuk membentuk satgasus yang kita enggak tahu dasar hukumnya dan enggak jelas juntrungannya," tutur Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (15/11).

Pihak KY memutuskan membentuk satgasus menyusul dua hakim Mahkamah Agung (MA) yang terlibat kasus korupsi. Sementara itu, menurut Syafi'i, lebih baik KY meningkatkan fungsi pengawasannya pada para hakim seperti yang telah diatur dalam undang-undang.

Sebab, pembentukan satgasus bakal menimbulkan berbagai pertanyaan publik.

"Nah satgasus ini yang bentuk siapa, bertanggung jawab kepada siapa, dan ke-

wenangannya seberapa, itu akan ada pertanyaan lagi. Terus kita DPR enggak tahu pula (pembentukan) itu," ujarnya.

Syafi'i menilai, ketimbang membentuk satgasus, lebih baik KY bekerja lebih keras untuk mengawasi perilaku para hakim.

"Ya kalau KY enggak mampu, ya KY saja yang enggak usah bekerja. Buat satgasus yang mengambil alih fungsi KY," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan,

PERINGATAN HUT KE-77 KORPS MARINIR

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono (kanan) didampingi Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Putranto (kiri) melakukan inspeksi pasukan pada Upacara Peringatan HUT ke-77 Korps Marinir di Ksatrian Marinir Cilandak, Jakarta, Selasa (15/11). Peringatan HUT ke-77 Korps Marinir itu diisi dengan defile pasukan dan kendaraan tempur, aksi ketangkasan prajurit, serta terjun payung "free fall".

Panglima TNI Kembali Lakukan Mutasi Besar-besaran terhadap Anak Buah Prabowo

JAKARTA (IM) - Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Perwira Menengah (Pamen) TNI yang bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Universitas Pertahanan (Unhan).

Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

Kebijakan mutasi terbaru ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1123/XI/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI yang ditetapkan pada 7 November 2022 ini menyebutkan, total ada 178 perwira menengah dari tiga matra baik darat, laut maupun udara yang dimutasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 orang yang bertugas di Kemhan dan Unhan mendapatkan tugas dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan ada 110 Pati TNI yang dimutasi dalam SK yang ditetapkan pada 28 September 2022 oleh

mantan KSAD tersebut.

Sebanyak 30 Pati anak buah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang bertugas di Kemhan dan Unhan dimutasi, di antaranya, Letkol Laut (S) Agus Niswan dimutasi menjadi Auditor Madya Itjen Kemhan, Kolonel Kav. Andi Wijaya Analis kebijakan Madya Bid. Sistem dan Metode Ditrenbanghan Dirjen Renhan Kemhan.

Kemudian Kolonel Chk Ramces Manurung menjadi Analis Kebijakan Madya Bid. Pengelolaan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Ro Turdang Setjen Kemhan. Kolonel Cku Rakhmad Hidayat menjadi Auditor Madya Itjen Kemhan.

Kolonel Arh Heri Wijanarko menjadi Kapus Tekinfo dan Kom Unhan. Letkol Cpm Inu Satya Nugraha menjadi Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara Baidiklat Kemhan., Letkol Chb Sandy Maulana Prakasa menjadi Analis Kebijakan Madya Sedstjen Strahan Kemhan, Letkol Laut (KH) Supriyono, menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Kondisi Sosial Dit Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan

Letkol Laut (KH) Abdul Charis, menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang SIMAK BMN Pus BMN Baranahan

Kemhan, Letkol Laut (K/W) Ns. Rahayu Susilowati, menjadi Perawat Madya Departemen Keperawatan RS dr Suyoto Pusrehab Kemhan, Letkol Laut (K) Suroso menjadi Perawat Madya Departemen Keperawatan RS dr Suyoto Pusrehab Kemhan

Kolonel Laut (T) Boy Sutan Sianipar, menjadi Kepala Bagian Umum Setditjen Kuahtan Kemhan, Kolonel Inf. Eddy Susanto menjadi Kepala Bagian Umum Setditjen Renhan Kemhan, Kolonel Kav. Rio Hendrawan Alin Putra menjadi Kepala Bagian Dukungan Administrasi dan Protokol Menteri Ro TU dan Prot Setjen Kemhan, Kolonel Sus Dendi menjadi Kepala Bagian Komponen Pendidikan dan Pelatihan Set Baidiklat Kemhan.

Kolonel Arm Guntur Eko Saputro, menjadi Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Ruum Unhan, Kolonel Adm Sotardodo Siahaan, menjadi Kepala Subdirektorat Penyusunan Evaluasi Kebijakan dan Strategi Ditjastrah Ditjen Strahan Kemhan. Kolonel Czi Heru menjadi Kepala Bagian Umum Setditjen Strahan Kemhan, Kolonel Czi Mulyadi menjadi Kepala Bagian Konstruksi Bangunan dan Barang Milik Negara Ruum Setjen Kemhan. ● han

Mantan Presiden ACT Ahyudin Dkk Didakwa Gelapkan Dana Rp117 Miliar

JAKARTA (IM) - Mantan presiden ACT Ahyudin didakwa menggelapkan dana Lion Air sebanyak Rp117 miliar. Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

"Bahwa terdakwa Ahyudin selaku ketua Presiden Global Islamic Philanthropy bersama-sama dengan Ibnu Khajjar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan juga menjabat selaku Senior Vice President Partnership Network Department GIP dan Hariyana Binti Hermain selaku Senior Vice President Operational GIP dan juga selaku Direktur Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997 diluar dari peruntukannya," ujar Jaksa saat membacakan dakwanya.

Jaksa melanjutkan, kegiatan di luar implementasi Boeing adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak Perusahaan Boeing sendiri. Perubahan terdakwa AHYUDIN dinilai melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan primari.

Jaksa menyebutkan dalam dakwaan Primairnya, Ahyudin bersama dua terdakwa lainnya, sekitar 28 Januari 2021 hingga Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, den-

gan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Diketahui Lion Air melalui The Boeing Company (Boeing) menyediakan dana sebesar USD 25.000.000 sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) untuk memberikan bantuan finansial kepada penerima langsung oleh para keluarga ahli waris dari para korban kecelakaan Lion Air 610.

Tidak hanya itu, Boeing juga memberikan dana sebesar USD 25.000.000 sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang merupakan bantuan filantropis pada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan, di mana dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, tapi diterima oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban.

Sementara ACT, sebagai pihak ketiga mengaku ditunjuk langsung oleh Boeing untuk menjadi lembaga pengelola dana donasi BCIF tersebut. Dalam perjalanannya, ACT meminta pihak keluarga korban menyetujui dana sosial BCIF sebesar USD 144.500 dari Boeing.

Akan tetapi, uang donasi BCIF tersebut digunakan oleh terdakwa Ahyudin bersama Ibnu Khajjar dan Hariyana Hermain sebesar Rp117 miliar bukan untuk peruntukannya. ● meci



RDP RANCANGAN PERATURAN BAWASLU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (kanan), Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kedua kanan), dan anggota KPU Mochammad Affuddin (kedua kiri) berbincaq sebelum dimulainya rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11). Rapat tersebut membahas tentang rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

PENGUMUMAN RENCANA PEMBARUAN REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembaruan REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 ("SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17").

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17, telah sepekat untuk melakukan pembaruan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembaruan REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 tertanggal 15 November 2022.
- Bahwa seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2022 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 yang telah diterbitkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Pembaruan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17.
- Pada tanggal 16 November 2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembaruan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 sejak tanggal 16 November 2022.
- Pembaruan dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembaruan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik

Jakarta, 16 November 2022

Manajer Investasi selaku Likuidator SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 17
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan